

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir dan Terra Ch.Triwahyuni, 2003, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Adrian Sutedi, 2014, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Rendra Rangkuti, 2016, *Efektivitas Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam, dalam Jurnal Of Law and Policy Transformation*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Arie S Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- _____, 1988, *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA*, Bandung, Alumni.
- _____, 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung Mandar Maju.
- Aslan Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Azikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2000, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria*, Jakarta, Djambatan.
- Byong-Nam Choe, et.al., *Land Management Information System in Korea*, Korea Research Institute for Human Settlements, Korea.
- C.S.T Kansil, P1989, *engantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Djulaeka dan Ridho Jusmadi, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.3, 2013.
- Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU No. 2008 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.
- Fairuz Syifa Arifin, 2008, *Pembaruan Agraria Nasional (PAN) Dengan Progam Sertifikasi Tanah Melalui Prona Guna Menyukkseskan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Pemalang*, Tesis, Progam Pasca Sarjana, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Hartanto Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I, Yogyakarta, Laksbang Mediatma.
- I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Pendaftaran Tanah*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi Revisi, STPN Press.
- Indiraharti, Novina S, 2009, *Penerapan Sistem Torrens Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Komparatif Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan Singapura)*, Makassar, Universitas 45 Press.
- Indri Hadisiswati, 2014, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, Ahkam, Volume 2 (1) Juli.
- Imam Soetiknjo, 1987, *Proses Terjadinya UUPA*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Ismail Alrip, Farida Patittingi, dan Faisal Abdullah, *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Jady@Zaidi Hassim, et.al., *Integrated Electronic Land Administration System in Malaysia*, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 5, No. 2, April 2013.
- Kementerian ATR/BPN, 2021, *Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020*, Jakarta, Kemneterian ATR/BPN.
- Krisch, N. *The Pluralism of Global Administrative Law*. The European Journal of International Law, 17 (1), 2016.

- Lantip Dian Prasajo, Riyanto, 2011, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta, Gava Media.
- Laudon dan Laudon, dalam Zul Fahlefi, 2014, *Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik*, Jurnal Paradigma, Vol.3 No.2, Agustus.
- Linda M. Sahono, 2012, *Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Perspektif, Edisi No.2, Vol.17.
- Lon L. Fuller, 1963, *The Morality of Law*, 2nd ed., New haven and London, Yale University Press, New haven and London.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1, Juni 2016.
- Mario Julyano dan A. Y. Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepodo, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Maria Soemardjono, 1982, *Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Muh. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Muh. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Bandung, Mandar Maju.
- N. M. Herdarezki, *Sistem Publikasi Tanah Positif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah)*, Jurnal Pertanahan, Vol. II, Nomor 1, November 2021..
- Nur Adhim, *Hasil Diskusi Kelas Pertanahan*, Hukum Agraria-Pertanahan Fakultas Hukum Undip, 5 Maret 2021.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Notonegoro, 1974, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nurhasan Ismail, 2007. *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM*, Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM.
- Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Jakarta, Mandar Maju.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok, Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika.

- Sudikno Mertokusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Tujuh, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- , 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika, Universitas Terbuka Karunika.
- Sudjito, 1987, *Prona Persertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraris : Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Jakarta, Kencana.
- Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta, STPN Press.
- Zevenbergen, Jaap. 2002, *System of Land Registration: Aspects and Effects*. Delft: Geodesy 51.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yanag Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri agrarian dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 Tahun 1997, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 Tahun 1997, yang kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, dan Pengangkatan Pejabat

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 Tentang Catur Tertib Bidang Pertanahan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 11/G/2000/PTUN.Mks

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-II/2003, 021/PUU-II/2003, dan 022/PUU-II/2003 dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

Adirin, A. Ada Sengketa Belasan Tahun Dibalik Program Sertifikat Tanah Gratis di Blora. Diperoleh Pada Sabtu 18 September 2021 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4450771/ada-sengketa-belasan-tahun-di-balik-program-sertifikat-tanah-gratis-di-blora>.

Bahfein, S. Kompas. Com. Kasus Pencurian Sertifikat, Potret Kelemahan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. Diperoleh Pada Sabtu 18 September 2021 dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/13/163000621/kasus-pencurian-sertifikat-potret-kelemahan-sistem-pendaftaran-tanah>.

Donny, J., Target PTSL Bertambah, Potensi Sengketa Semakin Banyak. Diperoleh Pada Sabtu 18 September 2021 dari <https://www.borneonews.co.id/berita/142898-target-ptsl-bertambah-potensi-sengketa-semakin-banyak>.

Emir Yanwardhana, Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 17:35 WITA.

Erwin Hutapea, Sengketa Tanah Antar-Perorangan Tembus 6.071Kasus, dalam <https://properti.kompas.com/read/2018/12/18/125954021/sengketa-tanah-antar-perorangan-tembus-6071-kasus>, 2018, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 19:35 WITA.

Toitu Te Whenua — Land Information New Zealand, Land Registration, <https://www.linz.govt.nz/land/land-registration/land-registration-user-guides-and-resources/e-dealing-faqs>, diakses 15 Mei 2022.

Yuni Astutik, 62 Juta Bidang Tanah di RI Telah Bersertifikat, 2019, dalam <https://www.Cnbcindonesia.com/news/20191107193303-4-113591/62-juta-bidang-tanah-di-ri-telah-bersertifikat>, diakses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 19:10 WITA.

Wardoyo, P., Kasus PTSL Bonagung Dilaporkan ke Polda Jateng. BPN Sragen Masih Tahan 50 Sertifikat PTSL 2019, 5 Sertifikat Ditarik dan Dibatalkan. Diperoleh Pada Sabtu 18 September 2021 dari <https://joglosemarnews.com/2019/11/kasus-ptsl-bonagung-dilaporkan-ke-polda-jateng-bpn-sragen-masih-tahan-50-sertifikat-ptsl-2019-5-sertifikat-ditarik-dan-dibatalkan>.

Wikipedia, Dalam Jaringan dan Luar Jaringan, dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, diakses
pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 20:20 WITA.

BIO DATA

A. Data Pribadi :

1. Nama : **Liong (Liong Rahman)**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Mei 1964
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Notaris – PPAT Kota Makassar
5. Alamat Rumah/Kantor : Jl. Sehati No. 13 Makassar
6. Status : Menikah
 - a. Isteri : St. Aminah
 - b. Anak : 1. Fieka Ariesty R,
2. Dwi Angrainy R,
3. Muh. Reynaldi Putra R,
4. Muh. Arya Putra R,
5. Muh. Rasya Putra R,
6. Laksmi Devi Afwani Fadhila L,
7. Ulil Amri,
8. Muh. Riyaldi Setya Hartanto
9. Muh. Refky Zan Haryady.

- Cucu : 1. Febriansyah H.
2. Anindya Fauzi Nadine H
3. Almeera Naysyila H
4. Arshyla Azzahra H
5. Azriel Alfarizqi S
6. Arsyia Abizard S
7. Zahrani Adifa A
8. Aunatullah Uzma A
9. Arsyila Savina Azzahra
10. Arka Alfarizqi

B. Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : SD Negeri Bara Baraya II, Tahun 1977
2. SMP : SMP Negeri 10 Makassar, Tahun 1981
3. SMA : SMA Cokroaminoto Makassar Tahun 1984
4. Program S 1 : Fakultas Hukum Unhas Makassar 1984

5. Program S 2

: Magister Kenotariatan UGM
Yogyakarta 2001

Karya Ilmiah Yang Telah Dipublikasikan

- Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja
- The Nature and Legal Standing On The Electronic Integrated Based Land Rights Registration